

Penyelesaian Pencemaran Laut Timor Dipertanyakan

Penyelesaian petaka pencemaran Laut Timor dituding dihambat para elite birokrat di Jakarta yang tergabung dalam Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Tim Nas PKDTML), sehingga sudah lebih dari dua tahun sejak terjadinya ledakan sumur minyak di ladang minyak Montara 21 Agustus 2009 tersebut tidak jelas dan terkatung-katung.

Penegasan ini disampaikan Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni menjawab pertanyaan wartawan di Kupang, Minggu (26/11) untuk menanggapi pernyataan Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Masnelyati Hilman bahwa penyelesaian kasus pencemaran Laut Timor ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan sementara Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya masih mempelajari seluk-beluk soal lingkungan sebelum mengambil berbagai langkah.

"Sejak awal terjadinya ledakan sumur minyak Montara, para elite birokrat ini tidak pernah mau mengakui bahwa perairan Indonesia telah tercemar, namun desakan demi desakan masyarakat NTT bersama YPTB akhirnya mereka mau mengakuinya", kata pemerhati masalah Laut Timor ini dalam siaran pers yang diterima *Jurnal Nasional*, Minggu.

Akan tetapi kata Ferdi, pengakuan tersebut belum cukup karena tidak diikuti dengan niat yang baik dan tulus untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah yang patut, transparan, menyeluruh dan kredibel sebagaimana lazimnya dalam penyelesaian suatu peristiwa pencemaran minyak di laut guna meminta pertanggungjawaban dari perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australasia dan Pemerintah Federal Australia.

Selain itu terhambatnya penyelesaian petaka pencemaran Laut Timor ini dikarenakan Jakarta menolak permintaan PTTEP Australasia untuk melakukan pembicaraan langsung dengan YPTB dan masyarakat korban di NTT dan semua *stakeholders* yang ada di NTT, tambah pemegang mandat hak ulayat masyarakat ada di Laut Timor ini.

PTTEP Australasia dan Pemerintah Australia kata Ferdi menyadari bahwa dalam penyelesaian petaka pencemaran Laut Timor ini pihak yang harus dilibatkan adalah YPTB.

Hal tersebut kata Ferdi menjelaskan karena hanya YPTB sajalah satu-satunya lembaga dari Indonesia yang sah mengajukan pengaduan secara resmi kepada Komisi Penyelidik Montara yang dibentuk Pemerintah Australia, bahkan YPTB dan aliansinya Senator Rachel Siewert dari Partai Hijau Australia melalui Komisi Penyelidik Montara ini telah membuktikan secara ilmiah pada Februari 2010, contoh tumpahan minyak yang ditemukan di perairan Indonesia 95 persen sama persis dengan yang dimuntahkan dari ladang Montara.

"Tidaklah berlebihan dengan bukti dan fakta yang ada ini saya menduga para elite birokrat di Jakarta yang terlibat langsung maupun tidak dalam penyelesaian petaka pencemaran Laut Timor ini memiliki agenda terselubung, akan tetapi tidak mungkin bisa berhasil, sebab mereka harus berhadapan dengan Australia di mana seluruh sistem negara itu berjalan sempurna," kata Tanoni. n **Jan Prince Permata**